

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan Renstra SKPD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan daerah atau tahap Ketiga dari RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Luwu Utara. Dalam menyusun rencana kerja maka RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk menjadi acuan. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai keuangan dan tupoksinya.

Renja Bappeda ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda Kab. Luwu Utara Tahun 2018 mendatang.

Masamba, Juli 2017

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUWU UTARA**

Ir. RUSYDI RASYID, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c

NIP : 19630705 199703 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
2.1. Latar Belakang	1
2.2. Landasan Hukum	3
2.3. Maksud dan Tujuan	5
2.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 dan Capaian Renstra Bappeda	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----	47
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda	53
3.3. Program dan Kegiatan	57
BAB IV. PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Bappeda s/d Tahun 2016 Kabupaten Luwu Utara
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Luwu Utara
3. Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Luwu Utara
4. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Luwu Utara
5. Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap penentapan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta semakin baiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang dilaksanakan untuk memenuhi tahapan perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan, lokasi kegiatan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan sumber dana, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Mengingat Rencana Kerja sebagai benang merah dalam implementasi Rencana Strategi yang tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki jabaran prespektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi SKPD. Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut maka Rancangan Renja Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 yang dijabarkan dari RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra SKPD 2016-2021. Rancangan Awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja didalam Rancangan Renja sesuai dengan rencana program prioritas yang ada di rancangan awal RKPD. Sedangkan Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, lokasi, target dan perkiraan maju serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD.

Tahun 2018 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Luwu Utara. RPJMD Kabupaten dan Renstra SKPD Tahun 2016-2021 merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Renja 2018. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Bappeda Tahun 2018 adalah program dan kegiatan sesuai dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 - 2016.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2018 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 – 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaten Luwu Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2018.
24. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/651/XII/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.
25. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 050/48/Bappeda/XII/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 – 2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2018 Kabupaten Luwu Utara.

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 yang memuat program dan kegiatan yang merupakan tolak ukur penilaian kinerja dan alat bantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk secara konsekuen dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah :

1. Bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
2. Acuan Badan Perencana Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
3. Sebagai alat kontrol organisasi dalam mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan;
4. Merumuskan program dan kegiatan perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2018;
5. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

- 1.1. Latar belakang penyusunan Renja,
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Renja,
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja
- 1.4. Sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015 dan capaian Renstra, memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dan pencapaian target Renstra 2010-2015 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda, berisikan kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Bappeda berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda.
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappeda Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-

Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan ke Bappeda maupun berdasarkan pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, yang menjelaskan terkait dengan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Bappeda, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Luwu Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.
- 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran apabila tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan atau tahun 2017 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan APBD tahun 2017.

Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 dan capaian Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SKPD oleh Bappeda Luwu Utara, Capaian kinerja out come (program) dan out put (kegiatan) SKPD Bappeda khusus tahun 2016 masing-masing sebesar 80,54% dan 97,73% dari yang semestinya 100% dengan kriteria capaian kinerja adalah SANGAT TINGGI. Sementara untuk capaian kinerja out come dan out put dari tahun 2017 SKPD ketika target capaian tahun 2017 tercapai, diperoleh hasil masing-masing sebesar 70,13% dan 72,08% dari yang semestinya $\pm 40\%$ untuk tahap II, masa pemerintahan Kabupaten Luwu

Utara Tahun pelaksanaan RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Luwu Utara, dengan kriteria tingkat capaian kinerja 2021 - 2021 adalah SANGAT TINGGI. Dan dari capaian tersebut 25 kegiatan dari 55 total kegiatan yang ada atau 43,86% telah mencapai target 100% dan ada 32 atau 56,14%, dan tidak ada kegiatan yang pencapaiannya diatas 100,00%. Hasil Evaluasi Renja tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

SKPD	CAPAIAN KINERJA OUT COME DAN OUT PUT		KRITERI CAPAIAN KINERJA		JUMLAH DAN PERSENTASE CAPAIAN KEGIATAN						KRITERIA KETEPATAN PERENCANAAN
	TAHUN 2016 (%)	TAHUN 2016-2017 (%)	2014	2015	JUMLAH		RENDAH	SESUAI TARGET	MELEBIHI TARGET	TDK TER-LAKSANA	
					PROGRAM	KEGIATAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
BAPPEDA	80,54	70,13	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI	11	55	25	32	0	0	
	97,73	72,08					43,86	56,14%	0,00%	0,00%	Sangat Tinggi

Dalam rancangan Renja Bappeda tahun 2018 selain melihat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan capaian Renstra Bappeda maka dapat pula digambarkan pencapaian kinerja keuangan berdasarkan evaluasi dokumen penggunaan anggaran mulai triwulan I sampai triwulan IV Bappeda Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Penelitian dan Statistik dengan total Realisasi Anggaran untuk Belanja Daerah dengan 16 program dan 59 kegiatan sebesar Rp 11.519.928.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.186.731.142,00 yang terdiri dari Realisasi Belanja Langsung Sebesar Rp 3.845.133.824,00 sedangkan

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.341.598.142,00 adapun rincian program dan kegiatan serta realisasi pendanaannya sebagai berikut :

**Realisasi Program / Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 883.868.000,-	Rp. 881,437,920,00	Rp. 2,340,080,00
	– Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 7.000.000,-	Rp. 6.945.000,-	Rp. 550000,-
	– Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 14,268,000,00	Rp. 14,265,500,00,-	Rp. 2,500,00,-
	– Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 14,600,000,00,-	Rp. 14,599,700,00,-	Rp. 300,00,-
	– Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 14.000.000,00,-	Rp. 13,999,400,00,-	Rp. 600,00,-
	– Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 16,000,000,00,-	Rp. 15,460,000,00,-	Rp. 540,000,00,-
	– Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp. 577,000,000,00,-	Rp. 575,178,420,00,-	Rp. 1,821,580,00,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	– Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan Asset	Rp. 241,000,000,00,-	Rp. 240,989,900,00,-	Rp. 10,100,00,-
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp. 318,200,000,00	Rp. 313,475,100,00	Rp. 4,724,500,00,-
	– Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp. 40,000,000,00,-	Rp. 38,555,000,00,-	Rp. 1,445,000,00,-
	– Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 45,000,000,00,-	Rp. 44,999,000,00,-	Rp. 1,000,00,-
	– Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 144,500,000,00,-	Rp. 144,151,000,00,-	Rp. 348,500,00,-
	– Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 10,000,000,00,-	Rp. 9,997,650,00	Rp. 2,350,00,-
	– Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 33,700,000,00,-	Rp. 30,801,350,00,-	Rp.2,898,650,00,-
	– Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp35,000,000,00,-	Rp. 34,972,000,00,-	Rp. 28,000,00,-
	– Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Rp. 10,000,000,00,-	Rp. 9,998,600,00,-	Rp.1,400,00,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp. 113,906,000,00	Rp. 111,796,250,00	Rp. 2,109,750,00,-
	– Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 113,906,000,00,-	Rp. 111,796,250,00,-	Rp. 2,109,750,00,-
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp. 9,766,800,00,-	Rp. 9,744,800,00,-	Rp. 22,000,00,-
	– Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 9,766,800,00,-	Rp. 9,744,800,00,-	Rp. 22,000,00,-
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Rp. 222,000,000,00	Rp. 219,545,530,00	Rp. 2,454,470,00,-
	– Penyusunan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 210.000.000,-	Rp. 32.030.800,-	Rp. 177.969.200,-
	– Operasi Satgas Pendampingan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya	Rp. 59.000.000,-	Rp. 58.943.680,-	Rp. 56.320,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	(Preview Penyusunan RPIJM Bidang Cipta Karya 2014 – 2019			
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STA TISTIK DAERAH	Rp. 172,450,000,00	Rp. 171,559,800,00	Rp. 850,200,00,-
	– Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data	Rp. 146,400,000,00	Rp. 145,571,400,00	Rp. 828,600,00,-
	– Penyusunan Dokumen SIPD	Rp. 26,050,000,00	Rp. 26,028,400,00	Rp.21,600,00,-
7.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Rp. 30,704,000,00,-	Rp. 30,090,000,00,-	Rp. 614,000,00,-
	– Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wkil Bupati/DPRD/M uspida/Pejabat Pemerntah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dan Pihak Lainnya	Rp. 30,704,000,00,-	Rp. 30,090,000,00,-	Rp. 614,000,00,-
9.	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN	Rp. 89,600,000,00	Rp. 88,050,748,00	Rp. 1,549,252,00,-
	– Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Rp. 89,600,000,00,-	Rp. 88,050,749,00,-	Rp. 1,549,252,00,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
10.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	Rp. 42,800,000,00,-	Rp. 41,589,000,00,-	Rp. 1,211,000,00,-
	– Koordinasi Penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh	Rp. 42,800,000,00,-	Rp.41,586,000,00,-	Rp.1,211,000,00,-
11.	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR	Rp. 463,166,150,00	Rp.425,731,250,00	Rp. 37,433,900,00
	– Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Rp. 127,500,000,00,-	Rp. 102,773,800,00,-	Rp. 24.772,620.00,-
	– Pemuktahiran dokumen SSK & MPS program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP)	Rp. 27,824,750,00,-	Rp.27,824,750,00,-	Rp. 0,00,-
	– Pelaksanaan study penilaian resiko kesehatan lingkungan (Emviromenta Health)	Rp. 228,030,000,00,-	Rp.275,322,300,00,-	Rp. 12,707,700,00,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	Assessment/EH RA) program PPSP – Penyusunan rencana induk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kota masamba	Rp. 19,811,400,00,-	Rp.19,811,400,00,-	Rp. 0,00,-
12.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.1,923,815,550,00	Rp.1,880,901,375,00	Rp.42,914,175,00,-
	– Penyusunan Rancangan RPJMD	Rp. 386,455,000,00,-	Rp. 386,454,707,00,-	Rp. 293,00,-
	– Penyelenggaraa n Murenbang RPJMD	Rp. 69,865,000,00,-	Rp. 69,848,934,00,-	Rp. 16,066,00,-
	– Penetapan RPJMD	Rp. 146,959,350,00,-	Rp. 123,623,150,00,-	Rp. 23,336,200,00,-
	– Penyusunan rencana RKPD	Rp.132,265,306,00,-	Rp. 127,379,500,00,-	Rp. 4,885,806,00,-
	– Penyelenggaraa n musrenbang RKPD	Rp. 330,767,894,00,-	Rp. 330,757,894,00,-	Rp. 10,000,00,-
	– Kordinasi penyusunan laporang keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Rp. 27,616,500,00,-	Rp. 27,587,700,00,-	Rp. 28,800,00,-
	– Monitoring, Evaluasi pelaporan	Rp. 543,001,000,00,-	Rp. 540,924,440,00,-	Rp. 2,086,560,00,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	– Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Rp. 176,193,500,00,-	Rp. 168,198,600,00,-	Rp. 7,994,900,00,-
	– Penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS	Rp. 96,300,000,00,-	Rp. 91,748,950,00,-	Rp. 4,551,050,00,-
	– Evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan	Rp. 14,382,000,00,-	Rp.14,377,500,00,-	Rp. 4,500,00,-
13.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Rp. 845,230,000,00,-	Rp. 826,165,148,00,-	Rp.9,064,852,00 ,-
	– Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Rp. 281,630,000,00	Rp. 217,711,348,00	Rp. 63.918.652,00
	– Koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah	Rp. 241,600,00,00	Rp. 228,786,800,00	Rp12,813,200,00
	– Pendampingan Program Swiss Contack	Rp. 50,000,000,00	Rp. 48,318,800,00	Rp. 1,681,200,00
	– Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Hortikultura	Rp120.000,000,00	Rp. 119.862.000.00	Rp138.000,00
	– Penyusunan Rencana Kerja Peraturan	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Rp0,00

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	Perundang-undangan			
	– Fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Rp. 60.000.000,00	Rp. 58,261,200,00	Rp.1.738,800,00
	– Penyusunan Dokumen Rencana Strategi Kemiskinan Daerah	Rp. 154.000.000,00	Rp152,225,000,00	Rp.1.775,000,00
14.	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA	Rp. 1.593.758.500,00	Rp. 1.455.304.200,00	Rp138.454,300,00
	– Koordinasi dan Evaluasi Program Sustainable Goals (SDG's)	Rp. 110.700.000,00	Rp. 64.653.100,00	Rp. 46.046.900,00
	– Fasilitasi Penguatan kelembagaan perencanaan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Rp. 78.200.000,00	Rp. 66.764,200,00	Rp. 11,435,800,00
	– Fasilitasi Penguatan Perencanaan Kabupaten Menuju Layak Anak	Rp. 151,374,500,00	Rp. 149.155.000,00	Rp2.219.500,00
	– Penyusunan Perda Perlindungan Anak	Rp221.884.000,00	Rp. 219.178.300,00	Rp2.705.700,00

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
	– Penyusunan Rencana Induk Penguatan Kelembagaan Prgram Pemberdayaan Perempuan	Rp. 230.800.000,00	Rp. 218.478,300,00	Rp12.321.700,00
	– Pengintegrasian Konvensi Hak Anak (KHA) Dalam Program dan Kegiatan	Rp. 285.000.000,00	Rp. 279.527.300,00	Rp5.472.700,00
	– Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Rp. 83.000.000,00	Rp. 32.072.400,00	Rp. 50.927.600,00
	– Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Rp. 201.700.000,00	Rp. 197.625.600,00	Rp. 4.074.400,00
15.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA.	Rp. 249.625.000,-	Rp. 230.218.600,-	Rp. 19.406.400,-
	– Perkuatan Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Luwu Utara	Rp. 157.100.000,-	Rp. 155.195.424,-	Rp. 1.904.576,-

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
16.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA	Rp. 186.500.000,00	Rp. 180.326.803,00	Rp6.173.197,00
	– Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	Rp. 186.500.000,00	Rp. 180.326.803,00	Rp6.173.197,00

Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda dan capaian Renstra 2016-2021 dapat terlihat se bagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA S/D TAHUN 2017
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kode	/Bidang Urusan pemerintah Dan Program Ke	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Periode Renstra 2016 - 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2016			Target Program dan Kegiatan Renja 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2017(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (7 + 9)	11 = (10/4)	12
4.03.	4.03 .01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur				11,76%			23,53%	
		03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis	85 Orang	30	10	10	100,00%	10	20	23,53%
		Program pengembangan data/informasi	Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sesuai SAP	%				100,00%			70,06%
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokume LAKIP	5 Dokumen	10	2	2	100,00%	2	4	80,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	10 Dokumen	10	2	2	100,00%	2	4	40,00%
		Program pengembangan data/informasi	Meningkatnya Pelayanan Kedinasan	%				100,00%			78,40%
		kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Daerah	Kunjungan Kerja	12 Bulan	12	12	12	100,00%	12	24	200,00%
4.03.	4.03 .01 .15	Program pengembangan data/informasi	Persentase Penyediaan Data dan Informasi					100,00%			52,00%
		01 Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang diperbaharui	10 Dokumen	0	0	0	0,00%	2	2	20,00%
		02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Tema Data yang disusun	5 Dokumen	1	0	0	0,00%	1	1	20,00%
			13 Tema Data								
		05 Penyusunan Profil Daerah	Jumlah buku profil daerah	1 Dokumen	0	1	1	100,00%	0	1	100,00%
		06 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Satgas Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya (RPI2JM)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya	1 Dokumen	1	1	1	100,00%	0	1	100,00%
		07 Penyusunan dan Pengumpulan Data /Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Fasilitasi teknis Tata Ruang Wilayah Kab. Luwu Utara	5 Dokumen	1	0	0	0,00%	1	1	20,00%
4.03.	4.03 .01 .15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data dan Informasi Pembangunan					100,00%			100,00%
		05 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data	1 Laporan	5	1	1	100,00%	0	1	100,00%
		07 Penyusunan Dokumen SIPD	Jumlah Dokumen SIPD	1 Dokumen	3	1	1	100,00%	0	1	100,00%
4.03.	4.03 .01 .20	Program Perencanaan Tata Ruang	Terciptanya Tata Ruang yang Terstruktur					100,00%			75,07%
		17 Pendampingan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Kota Hijau	340 Orang	0	340	340	100,00%	0	1	0,29%
		18 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang (RTRW) Kab. Luwu Utara	Dokumen Hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.	1 Dokumen	0	1	1	100,00%	0	1	100,00%
		20 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah Rapat Koordinasi BKPRD	1 Laporan	0	1	1	100,00%	0	1	100,00%

Kode	/Bidang Urusan pemerintah Dan Program Ke	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Periode Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2016			Target Program dan Kegiatan Renja 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2017(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (7 + 9)	11 = (10/4)	12
		14	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disinkronkan	8 Dokumen	8	8	100,00%	8	8	100,00%
		15	Penyusunan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS	Jumlah dokumen KUA/PPAS dan KUA P/PPAS P	4 Dokumen	0	4	100,00%	0	4	100,00%
		17	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RPJMD yang dievaluasi	1 Dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%
4.03.	4.03	.01	.18	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi			88,10%			83,70%
		02	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan Perkembangan Inflasi Daerah	5 Laporan	0	0	0,00%	1	1	20,00%
		04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Ipaoran hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur	6 Laporan	32	1	100,00%	1	2	33,33%
		06	Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen Masterplan Penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	0	0	0,00%	1	1	100,00%
		09	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah	Meningkatnya sinergitas dalam menanggulangi kemiskinan di daerah	1 Dokumen	1	1	100,00%	0	1	100,00%
		12	Pendampingan Program Swiss Countact	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Program Program Swiss Countact	1 Laporan	1	1	100,00%	0	1	100,00%
		13	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Holtikultura	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Holtikultura di Kec. Rongkong Khusus Sayur Mayur dan Buah-buahan Tanaman Daratan Tinggi	1 Dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%
		14	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya Perbup sebagai instrumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Perbup	0	2	100,00%	0	2	100,00%
		15	Fasilitasi Tim Pengendali Inflasi Daerah	Laporan Perkembangan inflasi Daerah	2 Laporan	1	2	100,00%	0	2	100,00%
		16	Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kemiskinan daerah	Tersedianya data informasi renstra kemiskinan	1 Dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%
4.03.	4.03	.01	.19	Program perencanaan sosial dan budaya	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat			83,33%			80,30%
		03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Koordinasi terhadap SKPD dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	6 Laporan	4	1	100,00%	1	2	33,33%
				Jumlah Koordinasi Pendampingan Program AMPL (WASH, WINS, STMB)	Laporan Tahunan						
				Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial (PSKS, PKH)	Jenis						
		04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev Kabupaten Menuju Layak Anak dan Kabupaten Sehat	6 Laporan	1	1	100,00%	1	2	33,33%

Kode	/Bidang Urusan pemerintah Dan Program Ke	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Periode Renstra 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun Berjalan 2016			Target Program dan Kegiatan Renja 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s/d Tahun 2017		Catatan
					Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Tahun 2017(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (7 + 9)	11 = (10/4)	12
		05 Koordinasi dan Evaluasi Program Sustainable Development Goals (SDG's)	Koordinasi dan Evaluasi Program Sustainable Development Goals (SDG's)	12 Kecamatan	12	12	100,00%	0	12	100,00%	
		06 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pengembangan Seni Budaya Lokal	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perencanaan Pengembangan Seni Budaya Lokal	1 Laporan	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
		06 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi RAD dan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	6 Q	0	0	0,00%	1	1	16,67%	
			Fasilitasi RAD dan Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					1			
			Jumlah laporan RAD Ham					3			
		07 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perencanaan Kabupaten Menuju Layak Anak	Jumlah desa/kel. Yang menetapkan layak anak (12 Kec, 164 desa & 7 kel): Jumlah rapat koordinasi layak	1 Laporan	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
		08 Penyusunan Perda Perlindungan Anak	Penyusunan Perda Perlindungan Anak	1 Dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
		09 Penyusunan Rencana Induk Penguatan Kelembagaan Program Pemberdayaan Perempuan	Fasilitasi penguatan program/kegiatan pemberdayaan perempuan di SKPD	1 Dokumen	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
		10 Pengintegrasian Konvensi Hak Anak (KHA) Dalam Program dan Kegiatan	Jumlah Peserta Musrenbang Anak	1 Laporan	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
		11 Koordinasi dan Evaluasi Program Perlindungan Sosial	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial	1 Laporan	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
		12 Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Laporan RAD-PPK	1 Laporan	0	1	100,00%	0	1	100,00%	
4.03.	4.03	.01 .20	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	Jumlah Pendampingan Kegiatan Pengairan			100,00%			100,00%	
			37 Perkuatan Kelembagaan dan pengolahan sumber daya air kabupaten luwu utara	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pengairan	1 Laporan	5	100,00%	0	1	100,00%	
4.03.	4.03	.01 .20	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana			100,00%			62,50%	
			01 Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana	1 Laporan	0	100,00%	0	1	100,00%	
			05 Koordinasi Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah Sosialisasi/Rapat Koordinasi Program WISMP	4 Laporan	0	0,00%	1	1	25,00%	
				Jumlah Laporan Pamsimas	Laporan	1					
				Jumlah Dokumen Review RPI2JM	Dokumen	1					
CAPAIAN KINERJA OUT COME							80,54%			70,13%	
CAPAIAN KINERJA OUT PUT							97,73%			72,08%	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Kab. Luwu Utara. Analisa Kinerja Pelayanan memuat kajian terhadap capaian kinerja yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD 2010-2016.

Adapun uraian Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda yang dilihat penggambaran 7 (tujuh) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai indikator kinerja yang diharapkan dengan penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran** *Meningkatnya kompetensi aparat perencana dengan indikator jumlah aparat perencana yang bersertifikasi* telah berhasil dicapai sampai dengan Desember 2016 yaitu sebanyak 10 aparat perencana. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan target Renstra tahun 2016 aparat perencana di Bappeda telah memiliki kompetensi yang memadai dengan diikutkannya dalam bimbingan dan pelatihan teknis perencanaan sesuai regulasi yang berlaku dan perkembangannya. Dalam Renstra Badan Perencana Pembangunan Daerah hingga akhir tahun 2015 di targetkan sebesar 52 aparat perencana, sehingga target tersebut telah diupayakan hingga akhir tahun 2016 sebagai tahun transisi.
2. **Sasaran** Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi. Pencapaian sasaran ini juga sangat dipengaruhi oleh indikator Jumlah Aplikasi. Pada tahun 2016 secara bertahap program dan kegiatan yang tersebar di SKPD dapat

terintegrasi dan menjadi base line data yang mudah diakses oleh publik.. Target itu meliputi Dokumen RKPD 2017 dan RKPD perubahan 2016. Dan diharapkan nantinya data dari SKPD semuanya berbasis sistem informasi yang online sehingga memudahkan pengguna data untuk memperoleh data yang lebih cepat dan dimana saja bisa diakses.

Pada tahun 2016 Bappeda melakukan kerjasama dengan BBPTP dengan menghasilkan dokumen RITIK sebagai pedoman dalam membangun E-Government melalui peningkatan sistem informasi pemerintah daerah. Dokumen RITIK telah disosialisasikan ke seluruh SKPD dengan harapan agar seluruh SKPD dapat menginventarisir dan mengidentifikasi kebutuhan IT-nya yang selanjutnya dapat terstandarisasi dan satu pintu dalam pengoperasiannya.

3. **Sasaran** teredianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan

Indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda, pada tahun 2016 Bappeda Kabupaten Luwu Utara telah berupaya mencapai sasarannya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 - 2021, dan tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun (RKPD) Tahun 2017.

4. **Sasaran** Terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan

Indikator persentase (%) penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2016 berupaya mencapai sasaran terjaminnya konsisten dokumen perencanaan

melalui beberapa program/kegiatan diantaranya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dimana Bappeda sebagai leading sektor dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara memiliki tugas dan fungsi pokok dalam memfasilitasi dan mensinkronisasikan semua dokumen perencanaan daerah seluruh perangkat kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara agar antara dokumen yang satu dokumen perencanaan dengan dokumen yang lainnya tidak terjadi overlapping sehingga mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk target dari jumlah dokumen yang disinkronkan ada 8 dokumen yang terdiri dari dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, KUA, PPAS, Renja dan RKA/DPA.

Program/kegiatan yang juga mendukung peningkatan kualitas dari terjaminnya konsistensi dokumen perencanaan adalah evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan. Dimana kegiatan yang dimaksud mengevaluasi dan mengendalikan Program/Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah sesuai dengan dokumen Renstra masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

5. **Sasaran** tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website. Kabupaten Luwu Utara di tahun 2016 telah berupaya mencapai sasaran tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website dengan beberapa **indikator** dan untuk **indikator** pertama yaitu jumlah jenis data dan informasi di Website pada tahun 2016 direalisasikan dengan mengupdate beberapa dokumen perencanaan ke Website milik daerah Kabupaten Luwu Utara untuk dijadikan bahan informasi publik.

Untuk yang kedua yaitu persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi terealisasi dengan terpublikasinya beberapa

dokumen dengan menyebarluaskan beberapa dokumen perencanaan ke masyarakat dan beberapa stakeholder.

6. **Sasaran** meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan. Target dan capaian **Indikator** kegiatan Musrenbang tepat waktu, yaitu direalisasikan dengan adanya pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat dan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan secara nasional. Dan **Indikator** penetapan RKPD tepat waktu, direalisasikan dengan penetapan peraturan daerah tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 ditetapkan tepat waktu yaitu pada tanggal 30 Mei 2016 demikian juga dengan **Indikator** Penetapan KUA PPAS tepat waktu, telah direalisasikan dengan penetapan nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan lembaga Eksekutif Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 25 November 2016.

Untuk **Indikator ketetapan pemanfaatan ruang wilayah** direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan operasional pelaksanaan kegiatan satgas Randal (Perencanaan dan Pengendalian Prgram Cipta Karya) dengan target satu dokumen RPI2JM, pendampingan program pengembangan kota hijau (P2KH) yaitu terlaksannya sosialisasi, rakor dan rapat forum dengan jumlah 340 orang tentang ruang terbuka hijau (RTH) yang merupakan inovasi perwujudan RTH perkotaan yang berbasis komunitas, serta terbangunnya 1 (satu) ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara yang diberi nama Taman Pintar. Dengan terbangunnya Taman ini, maka Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu memenuhi perwujudan kota hijau sebagai upaya untuk membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota yang mampu melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan lainnya yang mendukung tercapainya **Indikator ketetapan pemanfaatan ruang wilayah** adalah

kegiatan peninjauan kembali Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab. Luwu Utara, terealisasi dengan 1 (satu) dokumen hasil peninjauan kembali RTRW wilayah Kab. Luwu Utara.

Indikator Persentase capaian pelaksanaan pembangunan direalisasikan dengan kegiatan koordinasi penyusunan ketereangan pertanggungjawaban (LKPJ) dengan target disusunnya 1 (satu) dokumen laporan keteranga pertanggungjawaban

Jumlah SKPD yang dikoordinasikan direalisasikan dengan adanya kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi data, pendampingan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS), koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pendampingan program Swiss Countact, koordinasi [erencanaan pembangunan bidang sosial budaya, koordinasi dan evaluasi program Sustainable Development Goals (SDG's), fasilitasi penguatan kelembagaan perencanaan pengembangan seni budaya lokal, fasilitasi penguatan kelembagaan perencanaan kabupaten layak anak, koordinasi pengendalian dan evaluasi program perlindungan sosial, fasilitasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan I korupsi, perkuatan kelembagaan dan pengelohan sumber daya air Kabupaten Luwu Utara, dan rapat koordinasi bidang Fisik dan Prasarana.

7. **Sasaran** persentase partisipasi masyarakat dalam monev dengan target dan capaian **Indikator** persentase partisipasi masyarakat dalam monev dan **Indikator** persentase partisipasi perempuan dalam monev, Bappeda Kabupaten Luwu Utara di tahun 2016 telah berupaya mencapai sasaran dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti monev dengan melibatkan unsur masyarakat dan lembaga serta keterwakilan perempuan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Capaian kinerja pelayanan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel.2. berikut ini.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Luwu Utara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi secara garis besar untuk kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi yang ditentukan oleh peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun isu-isu penting pada tahun 2016 antara lain :

1. Data dan informasi daerah yang bersifat dinamis dengan perubahan yang berlangsung cepat, sehingga berpengaruh pada proses pengumpulan dan penyusunan data dan informasi daerah sebagai dasar dalam menyusun suatu perencanaan;
2. Perbedaan cara pandang dan metode dalam melakukan analisa terhadap data yang ada sehingga memunculkan bermacam-macam persepsi dan tafsir terhadap kondisi yang ada;
3. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan lintas sektor/bidang yang membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan, sedangkan di sisi yang lain tetap harus dapat menyelenggarakan tugas pokok sesuai bidang tugas masing-masing;
4. Adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak secara signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat terutama di daerah;
5. Pergantian atau mutasi aparat Bappeda sebagai motor penggerak kegiatan perencanaan yang berkelanjutan juga turut mempengaruhi kinerja Bappeda itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
6. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang harus menunjang aparat Bappeda yang menuntut mobilitas yang tinggi;

7. Revolusi mental yang merupakan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi dasar bagi aparat Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berdasarkan pelayanan dan sasaran jangka menengah Renstra.

A. Gambaran Pelayanan Bappeda

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan

- 1). Bappeda sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan didukung oleh jumlah personil yang mencukupi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2). Petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga memudahkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya;
- 3). Ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan;
- 4). Fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

b. Kelemahan

- 1). Tingkat kompetensi aparat perencana dan pemahaman staf Bappeda terhadap tupoksi masih lemah;
- 2). Metode perencanaan pembangunan masih kurang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada;

- 3). Belum optimalnya sistem yang digunakan dalam pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi pembangunan;
- 4). Pengelolaan data dan informasi yang belum optimal;
- 5). Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

- 1). Adanya dukungan penuh dari pimpinan dalam rangka peningkatan kompetensi perencana Bappeda melalui program pengembangan profesionalisme aparatur yang disertai dengan penganggarannya.
- 2). Tersedianya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008.
- 3). Kesadaran dan Kemauan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan masih tinggi.
- 4). Tersedianya data dan informasi dalam mendukung kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan

b. Tantangan

- 1). Adanya perubahan-perubahan kebijakan oleh pimpinan daerah yang berdampak secara signifikan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

<p>tugas dan fungsinya</p> <p>3. Ketersediaan data dan informasi yang dapat digunakan dalam menyusun dokumen perencanaan</p> <p>4. Fungsi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan</p>		
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kompetensi aparat perencana dan pemahaman staf Bappeda terhadap tupoksi masih lemah 2. Metode perencanaan pembangunan masih kurang sesuai dengan petunjuk teknis yang ada 3. Belum optimalnya sistem yang digunakan dalam pelibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi pembangunan 4. Pengelolaan data dan informasi yang belum optimal 5. Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan secara efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi aparat perencana 2. Penyesuaian metode perencanaan pembangunan dengan petunjuk teknis yang ada 3. Peningkatan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif 4. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pengawasan pembangunan 2. Pembaharuan data dan informasi yang valid dan periodik 3. Pengembangan sistem monitoring yang efektif dan efisien

B. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMN 2015 – 2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang dihadapi, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015 – 2019 adalah :

1. meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
3. mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;

4. mempercepat kualitas lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim;
5. menyiapkan landasan pembangunan yang kokoh;
6. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. meningkatkan kualitas lingkungan mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan
8. meningkatkan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam lima tahun mendatang, kementerian PPN/Bappenas berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019 yang telah mengandung visi dan misi Nawacita. Dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2015 – 2019 tersebut, Keenterian PPN/Bappenas melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tujuan yaitu :

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel; dan
2. mewujudkan manajemen tata kelola kelembagaan pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Untuk mewujudkan kedua tujuan tersebut ditetapkan arah kebijakan /strategis yang sesuai dengan agenda Nawacita yaitu ;

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya politik luar negeri yang bebas dan aktif , penguatan sistem pertahanan, kedaulatan negara dan peningkatan posisi Indonesia dalam kerjasama global dan regional.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan saran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara dan kerjasama pembangunan internasional;
2. penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi pertahanan dan kemanan serta kerjasama pembangunan internasional; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam)

2. membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Sasaran yang ingin dicapai ingin diwujudkan adalah terwujudnya demokrasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta terwujudnya birokrasi nasional yang berkualitas.

Arah kebijakan dan strategis untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. penigkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang apartaur negara, politik dan komunikasi;
2. penyusunan rencana pembangunan dibidang aparatur negara, politik dan komunikasi; serta
3. pemantauan, evaluasi dan pengedalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pihukhankam.

3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya desentralisasi yang produktif, pemerataan pembangunan antarwilayah, dan penanggulangan kemiskinan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan otonomi daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan negara, rawan bencana, perkotaan, dan perdesaan; dan
3. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Implementasi arah kebijakan dan strategis dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang polhukhankam dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya penegakkan hukum yang berkeadilan di seluruh aspek pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang hukum dan regulasi;
2. penyusunan rencana pembangunan di bidang hukum, strategi nasional reformasi regulasi; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputy Bidang Polhukhankam.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya pembangunan kependudukan dan keluarga yang sejahtera serta manusia Indonesia yang sehat dan terdidik.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
2. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputy bidang Kependudukan dan ketanagakerjaan dan Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.

6. Meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya konektivitas nasional untuk keseimbangan pembangunan nasional, terbangunnya sarana dan prasarana dasar, transportasi umum, massal dan perkotaan, penguatan investasi termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan non anggaran pemerintah, pelibatan BUMN sebagai agen pembangunan, peningkatan kapasitas inovasi, teknologi dan perdagangan serta daya saing tenaga kerja.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
2. penyusunan rencana pembangunan nasional yang terintegrasi antara pusat dan daerah termasuk penyiapan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kota baru, insentif ketenagakerjaan; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional.

Impelmentasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, pelestarian sumber daya alam,

lingkungan hidup dan manajemen resiko bencana, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, penguatan sistem mitigasi dan adaptasi iklim dan maritim, serta penguatan stabilitas sektor keuangan dan kapasitas fiskal negara.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. penyusunan rencana pembangunan nasional pada sektor-sektor ekonomi tersebut; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional pada sektor-sektor ekonomi tersebut.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ekonomi, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civil education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti : pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air semangat bela negara dan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang pendidikan;

2. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Implementasi arah kebijakan dan strategis dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Sasaran yang ingin diwujudkan adalah pendidikan ke-Bhineka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Arah kebijakan dan strategi untuk mewujudkan sasaran di atas adalah :

1. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd

Review terhadap rancangan awal RKPd dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Bappeda dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Bappeda, dengan arahan Kepala Daerah

terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Bappeda berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Untuk lebih jelasnya, selanjutnya dapat digambarkan Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01 Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dan pihak lainnya	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Kunjungan Kerja	1 Tahun	25.000.000						
4.03. 4.03 .01 .15	Program Pengembangan Data dan Informasi		Persentase Penyediaan Data dan Informasi								
	01 Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Kantor Bappeda	Jumlah dokumen informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang diperbaharui/Jumlah dokumen yang terup date	2 Dokumen	50.400.000						
	02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Kantor Bappeda	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	161.700.000						
			Jumlah Tema data	2 Tema Data							
	07 Penyusunan dan Pengumpulan Data /Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Kab. Luwu Utara	Jumlah dokumen Fasilitas Teknis RencanaTata Ruang Wilayah Kab. Luwu Utara	1 Dokumen	250.000.000						
4.03. 4.03 .01 .15	Program Kerjasama Pembanunan		Sinkronisasi Program Pembanunan Antar								
	02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan koordinasi Kejasama antara daerah	1 Laporan	58.500.000						
	03 Koordinasi kerjasama dengan Dunia usaha/lembaga	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Terlaksananya Pendampingan Program dengan dunia usaha/Lembaga	1 Laporan	104.400.000						
4.03. 4.03 .01 .17	Program perencanaan pembangunan daerah		Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah								
	08 Penyusunan Rancangan RKPD	Kantor Bappeda	Dokumen RKPD 2018 dan Perubahan RKPD 2017	2 Dokumen	195.000.000						
			Jumlah Dokumen KUA 2018 dan KUA-P 2017								
			Jumlah Dokumen PPAS 2018 dan PPAS-P 2017								
	09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Kecamatan, Kabupaten, Regional, Provinsi	Jumlah dokumen Musrenbang Tahun 2019	1 Laporan	352.800.000						
	12 Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Kantor Bappeda	Dokumen LKPJ Tahun 2017	1 Dokumen	31.000.000						
	13 Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Kab. Luwu Utara	Jumlah Monev	4 Kali (Triwulan)	479.400.000						
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Dana APBD	-							
			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Dana APBN dan APBD Provinsi	-							
4.03. 4.03 .01 .18	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi								
	02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kab. Luwu Utara	Kantor Bappeda	Jumlah Laporan Perkembangan Inflasi Daerah	1 Laporan	78.100.000						

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur	1 Laporan	489.280.000						
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Pesisir	Kab. Luwu Utara	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Pesisir	1 Dokumen	200.000.000						
4.03. 4.03 .01 .18	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		Terciptanya Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Terpadu								
	09 Koordinasi Perencanaan Air minum, drainase dan sanitasi Perkotaan	Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase, sanitasi perkotaan	1 Laporan	189.750.000						
4.03. 4.03 .01 .19	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat								
	03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial	1 Laporan	382.500.000						
			Jumlah Koordinasi Pendampingan Program AMPL (WASH, WINS, STMB)	1 Laporan Tahunan							
			Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial (PSKS, PKH)	2 Jenis							
	04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan Monev Kabupaten Menuju Layak Anak dan Kabupaten Sehat dan Monev Desa Mandiri	2 Laporan	146.880.000						
	06 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Luwu Utara	Fasilitasi RAD dan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	1 Laporan	173.400.000						
			Fasilitasi RAD dan Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Dokumen RAD							
			RAD HAM	3 Kec. Pegunungan 1 Kegiatan 1 Kegiatan							
4.03. 4.03 .01 .20	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana								
	05 Koordinasi Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan/Dokumen Instrumen Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana	4 Kali / Triwulan	345.000.000						
				1 Laporan							
				1 Laporan							
					5.089.710.000						

Tabel. 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2019
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.03. 4.03 .01 .01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Kantor Bappeda	500 Pucuk	10.000.000	APBD		500 Pucuk	12.000.000
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi/Jaringan	Kantor Bappeda	12 Bullan	15.000.000			12 Bullan	18.000.000
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Mobil Dinas/Operasional yang diterbitkan dokumen izinnnya	Kab. Luwu Utara	3 Unit (2 Mobil, 1 Motor)	7.000.000			3 Unit (2 Mobil, 1 Motor)	8.400.000
	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya Pelayanan Kebersihan Kantor	Kantor Bappeda	6 Jenis	19.000.000	APBD		6 Jenis	22.800.000
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Bappeda	5 Jenis	9.000.000	APBD		5 Jenis	10.800.000
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Bappeda	8 Jenis	20.000.000	APBD		8 Jenis	24.000.000
	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Aparat yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat, Bid.Fisik dan Prasarana,Bid,Ekonomi, Bid.Sos.Bud dan Bid.Penelitian dan Statistik	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	48 Orang	540.000.000	APBD		48 Orang	648.000.000
	19 Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian , Ketatausahaan dan Asset	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian dan Asset	Kantor Bappeda	8 Dokumen	291.600.000	APBD		8 Dokumen	349.920.000
4.03. 4.03 .01 .02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian							
	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Bappeda	2 Jenis (AC 1 PK)	7.000.000	APBD		2 Jenis (AC 1 PK)	8.400.000
	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kantor Bappeda	3 Paket	200.000.000			-	-
	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor Bappeda	1 Unit	13.000.000	APBD		1 Unit	15.600.000
	24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Bappeda	3 Unit (2 Mobil, 1 Motor)	26.000.000	APBD		3 Unit (2 Mobil, 1 Motor)	31.200.000
	28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kantor Bappeda	1 Paket (Komputer, Laptop, Printer, Mesin	26.000.000	APBD		1 Paket (Komputer, Laptop, Printer,	31.200.000
	29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Terpeliharanya Meubeler	Kantor Bappeda	3 Jenis (Meja, Kursi,	13.000.000	APBD		3 Jenis (Meja, Kursi,	15.600.000
4.03. 4.03 .01 .05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur							
	03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis	Kabupaten, Provinsi dan Pusat	15 Orang	150.000.000	APBD		15 Orang	326.250.000
4.03. 4.03 .01 .06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertib administrasi laporan keuangan sesuai SAP dan Capaian Kinerja							
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	Kantor Bappeda	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	18.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Renja tahun n dan Renja Perubahan tahun n-1	Kantor Bappeda	2 Dokumen	15.000.000	APBD		2 Dokumen	18.000.000
4.03. 4.03 .01 .09	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	Meningkatkan Pelayanan dan Kapasitas Pejabat Pemerintahan dan Pejabat Masyarakat							
	01 Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati/DPRD/Muspida/Pejabat Pemerintah Tingkat Atas/Unit Kerja Terkait dan pihak lainnya	Jumlah Kunjungan Kerja	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	1 Tahun	25.000.000	APBD		1 Tahun	30.000.000
4.03. 4.03 .01 .15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Penyediaan Data dan Informasi							
	01 Pengumpulan, Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Jumlah dokumen informasi capaian target kinerja program dan kegiatan yang diperbaharui/Jumlah dokumen yang terup date	Kantor Bappeda	2 Dokumen	50.400.000	APBD		2 Dokumen	51.408.000
	02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang disusun	Kantor Bappeda	1 Dokumen	161.700.000	APBD		1 Dokumen	1.617.000
		Jumlah Tema data		2 Tema Data				2 Tema Data	
	07 Penyusunan dan Pengumpulan Data /Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen Fasilitasi Teknis RencanaTata Ruang Wilayah Kab. Luwu Utara	Kab. Luwu Utara	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
4.03. 4.03 .01 .15	Program Kerjasama Pembangunan	Sinkronisasi Program Pembangunan Antar Daerah							
	02 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar daerah	Jumlah Laporan koordinasi Kejasama antara daerah	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	1 Laporan	58.500.000	APBD		1 Laporan	70.200.000
	03 Koordinasi kerjasama dengan Dunia usaha/lembaga	Terlaksananya Pendampingan Program dengan dunia usaha/Lembaga	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	1 Laporan	104.400.000	APBD		1 Laporan	125.280.000
4.03. 4.03 .01 .17	Program perencanaan pembangunan daerah	Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah						Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	
	08 Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD 2018 dan Perubahan RKPD 2017	Kantor Bappeda	2 Dokumen	195.000.000	APBD		2 Dokumen	200.000.000
		Jumlah Dokumen KUA 2018 dan KUA-P 2017							
		Jumlah Dokumen PPAS 2018 dan PPAS-P 2017							
	09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen Musrenbang Tahun 2019	Kecamatan, Kabupaten, Regional, Provinsi	1 Laporan	352.800.000	APBD		1 Laporan	362.800.000
	12 Koordinasi Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Tahun 2017	Kantor Bappeda	1 Dokumen	31.000.000	APBD		1 Dokumen	31.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13 Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Monev	Kab. Luwu Utara	4 Kali (Triwulan)	479.400.000	APBD		4 Kali (Triwulan)	488.988.000
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Dana APBD		-		APBD			
		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Dana APBN dan APBD Provinsi		-		APBD			
4.03. 4.03 .01 .18	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi							
	02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kab. Luwu Utara	Jumlah Laporan Perkembangan Inflasi Daerah	Kantor Bappeda	1 Laporan	78.100.000	APBD		1 Laporan	85.910.000
	04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Laporan hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi, SDA dan Infrastruktur	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	1 Laporan	489.280.000	APBD		1 Laporan	538.208.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Pesisir	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Pesisir	Kab. Luwu Utara	1 Dokumen	200.000.000			-	-
4.03. 4.03 .01 .18	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terciptanya Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Terpadu							
	09 Koordinasi Perencanaan Air minum, drainase dan sanitasi Perkotaan	Jumlah Laporan koordinasi perencanaan air minum, drainase, sanitasi perkotaan	Kab. Luwu Utara	1 Laporan	189.750.000	APBD		1 Laporan	218.212.500
4.03. 4.03 .01 .19	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Instrumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat							
	03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	1 Laporan	382.500.000	APBD		1 Laporan	390.150.000
		Jumlah Koordinasi Pendampingan Program AMPL (WASH, WINS, STMB)		1 Laporan Tahunan					
		Pemantauan Penyaluran Bantuan Sosial (PSKS, PKH)		2 Jenis					
	04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev Kabupaten Menuju Layak Anak dan Kabupaten Sehat dan Monev Desa Mandiri	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	2 Laporan	146.880.000	APBD		1 Laporan	149.818.000
	06 Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Fasilitasi RAD dan Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Dalam Daerah dan Luar Daerah Kab. Kab. Luwu Utara	1 Laporan	173.400.000	APBD		1 Laporan	176.868.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Fasilitasi RAD dan Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1 Dokumen RAD					
		RAD HAM		3 Kec. Pegunungan					
				1 Kegiatan					
				1 Kegiatan					
4.03. 4.03 .01 .20	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana							
	05 Koordinasi Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Jumlah Laporan/Dokumen Instrumen Perencanaan Bidang Fisik & Prasarana	Kab. Luwu Utara	4 Kali / Triwulan	345.000.000	APBD		4 Kali / Triwulan	396.750.000
				1 Laporan					
				1 Laporan					
		J U M L A H			5.089.710.000				4.975.379.500

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Bappeda Kabupaten Luwu Utara sebagai unsur perencana pembangunan daerah tidak terkait langsung dalam penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat tetapi sebagai penyelenggara dalam proses penjarangan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan.

Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2014 yang tertuang di dalam RPJMD 2010-2015. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan dokumen Rencana Kerja pada bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2017 beserta prognosis. Sebelum merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Telaahan tersebut menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang saling terkait dengan kebijakan pembangunan provinsi dan kebijakan pembangunan daerah.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sejalan dengan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2018 sejalan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan maupun tingkat nasional. Pelaksanaan pembangunan berpedoman kepada aspek koordinasi, keterpaduan dan kesinambungan dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan daerah

dirumuskan prioritas pembangunan daerah yang menjadi benang merah menuju sasaran lima tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Pembangunan Daerah Tahunan. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 merupakan pelaksanaan RPJMD Kab. Luwu Utara 2016 – 2021, yang juga sejalan dengan tema, arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2018.

Sejalan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi, dan dengan memperhatikan arah pembangunan dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan pelaksanaan Tahap ke III (tiga) RPJPD Tahun 2016 - 2021 serta realisasi pembangunan daerah tahun lalu, maka Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 adalah **“Akselerasi pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan dan penguatan kualitas manusia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan”**

Sejalan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional maka Arah Kebijakan Pembangunan Tahun yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Adapun Prioritas Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 diarahkan pada:

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi;
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan;
3. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pembangunan kesehatan;
4. Pengembangan strategis;
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan;

6. Peningkatan daya saing pasar internasional;

Adapun penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Luwu Utara tahun 2018 di Prioritas kepada kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- Pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi;
- Pembangunan dan pelayanan pendidikan;
- Pembangunan dan pelayanan kesehatan;
- Penguatan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan;
- Pembangunan pertanian dan perikanan;
- Pengembangan koperasi dan UMKM;
- Pembangunan pusat inovasi produk dan industri kreatif daerah;
- Pengembangan kompetensi dan ruang kreatifitas bagi pemuda;
- Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Pengelolaan kebudayaan daerah;
- Optimalisasi potensi pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan potensi tambang;
- Mengoptimalkan peran Perusda/BUMD dalam pengelolaan aset-aset daerah

Sehingga dengan melihat arah kebijakan pembangunan antara nasional, provinsi dan kabupaten tetap sinergi yang fokus kepada penguatan perekonomian daerah dan Peningkatan kualitas pelayanan publik . Penguatan perekonomian merupakan upaya untuk mendorong aktivitas perekonomian sehingga tidak rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Peningkatan kualitas pelayanan publik semakin ditingkatkan sehingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dapat terpenuhi. Aspek perekonomian dan pembangunan infrastruktur dan menyiapkan sumber daya manusia demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat untuk mendukung pembangunan nasional dan Provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah yang baik. Untuk itu, disusunlah visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Luwu Utara

VISI : Visioner, Inovatif dan Terukur dalam Perencanaan

MISI I : Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Perencana dalam membuat perencanaan yang berkualitas;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN	
			2017	2018
Mewujudkan perencana yang memiliki kompetensi	Meningkatnya kompetensi aparat perencana	Jumlah aparat perencana yang bersertifikasi	2 Orang	2 Orang

**MISI II : Memantapkan Fungsi Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel dan
Transparan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-	
			2017	2018
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel dan traansparant	Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi	Jumlah Aplikasi	1 Sistem	-
	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-
		2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-
		3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	2 Dok	2 Dok
	Terjaminnya konsisten si dokumen perencanaan	Persentase (%) penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-	
			2017	2018
Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi	Tersedianya data dan informasi pembangunan melalui website	1. Jumlah jenis data dan informasi di website	3	3
		2. Persentase produk dokumen perencanaan yang terpublikasi	100%	100%

MISI III : Memantapkan Fungsi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Masyarakat dan Teknologi Informasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-	
			2017	2018
Meningkatkan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan	1. Kegiatan Musrenbang tepat waktu	Tepat	Tepat
		2. Penetapan RKPD Tepat waktu	Tepat	Tepat
		3. Penetapan KUA PPAS tepat waktu	Tepat	Tepat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-	
			2017	2018
		4. Ketepatan pemanfaatan ruang wilayah	Tepat	Tepat
		5. Persentase capaian pelaksanaan pembangunan	95	95
		6. Jumlah SKPD yang dikoordinasikan	45	45
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam monev	70%	75%
		2. Persentase partisipasi perempuan dalam monev	20%	25%

MISI IV : Mewujudkan Bappeda sebagai Wali Data

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-	
			2017	2018
Mewujudkan Bappeda sebagai Pusat Data Perencanaan Pembangunan Daerah yang "real time"	Terwujudnya pusat data perencanaan pembangunan daerah yang "real time"	Jumlah jenis data	3	3

3.3 Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Bappeda guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018 beserta prognosinya dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

Dalam penyusunan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2018 ini yang menjadi catatan penting adalah bahwa dalam pelaksanaan penyusunan dan penetapan berbagai program dan kegiatan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian hasil yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang didalam Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian hasil maka pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan baik ditinjau dari segi kerangka regulasi yang menjadi acuan maupun sinkronisasi antar dokumen perencanaan maka yang paling penting adalah tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Bappeda selaku perencana pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penyempunaan penyusunan Rancangan Renja Bappeda ini perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan antara lain :

1. Dalam penyusunan Rancangan Renja Bappeda tetap berpedoman kepada tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu persamaan persepsi dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan diatasnya.

Adapun rencana tindak lanjut dalam penyusunan Rancangan Renja Bappeda Tahun 2018 antara lain dalam meningkatkan kualitas perencanaan antara lain perlunya upaya peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur perencana secara berkesinambungan dalam rangka melaksanakan tugas

perencanaan yang semakin kompleks. Selain itu, perlu juga upaya peningkatan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga pemahaman akan pentingnya perencanaan pembangunan daerah dan transparansi anggaran akan terwujud. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja aparatur Bappeda kearah yang lebih baik dimasa akan datang.